



EFEKTIVITAS REVITALISASI WISATA TAMAN APUNG MASKEMAMBANG DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS

**Siti Sundari¹, Indah Ayu Permana Pribadi², Zaula Rizqi Atika³, Chamid Sutikno⁴,
Ariesta Amanda⁵**

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto,
Indonesia

Email: sitisundarindari62@gmail.com¹, iap.pribadi@unupurwokerto.ac.id²,
zr.atika@unupurwokerto.ac.id³, c.sutikno@unupurwokerto.ac.id⁴,
ariestaamanda92@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan efektivitas program revitalisasi Wisata Taman Apung Maskemambang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana revitalisasi kawasan wisata mampu meningkatkan daya tarik wisatawan, memperbaiki kualitas fasilitas dan pengelolaan kawasan, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pemberdayaan UMKM dan penyerapan tenaga kerja lokal. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis keberhasilan program revitalisasi berdasarkan aspek efektivitas kebijakan publik. Menurut William N. Dunn yang meliputi efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Revitalisasi Taman Apung Maskemambang dapat meningkatkan PAD Kabupaten Banyumas. Revitalisasi, yang didanai oleh Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), berfokus pada meningkatkan daya tarik wisata dengan meningkatkan fasilitas fisik dan sistem manajemen. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif yang dikombinasikan dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi terhadap informan penting, termasuk pengelola taman, masyarakat sekitar, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Revitalisasi Taman Apung Maskemambang efektif sebagai strategi pemulihan pariwisata dan pembangunan ekonomi berkelanjutan, karena UMKM membantu stabilisasi pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ekonomi masyarakat lokal.

Kata kunci: Pariwisata, Revitalisasi, Pendapatan Asli Daerah, Taman Apung Maskemambang.

Abstract

This study aims to determine, analyze, and describe the effectiveness of the Maskemambang Floating Park Tourism revitalization program implemented by the Banyumas Regency Government in increasing Regional Original Income (PAD). In addition, this study also aims to identify the extent to which the revitalization of the tourist area is able to increase tourist attraction, improve the quality of facilities and area management, and provide economic impacts for the surrounding community through empowering MSMEs and absorbing local labor. This study was conducted to analyze the success of the revitalization program based on aspects of public policy effectiveness. According to William N. Dunn which includes efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. The revitalization of the Maskemambang Floating Park can increase the PAD of Banyumas Regency. The revitalization, funded by the National Economic Recovery Program (PEN), focuses on increasing tourist attraction by improving physical facilities and management systems. This study was conducted through a qualitative approach combined with a descriptive approach. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation studies of key informants, including park managers, the surrounding community, the Regional Public Service Agency (BLUD), and micro, small, and medium enterprises (MSMEs). The revitalization of the Maskemambang Floating Park is effective as a strategy for tourism recovery and sustainable economic development, as MSMEs help stabilize incomes, create jobs, and boost the local economy.

Keywords : Effectiveness, Locally Generated Revenue, Revitalization Tourism, Maskemambang Floating Park.

PENDAHULUAN

Strategi pembangunan pariwisata menjadi kunci dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat sektor ini memiliki potensi ekonomi yang besar dan dampak yang luas. Pendekatan strategis diperlukan agar pengembangan objek wisata dilakukan secara terarah, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Strategi tersebut mencakup perencanaan yang matang, penguatan kelembagaan, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam promosi destinasi. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan akses informasi yang cepat, pariwisata telah berkembang menjadi salah satu penggerak utama dalam perekonomian global. Pariwisata tidak hanya menawarkan kontribusi langsung melalui pendapatan dari sektor akomodasi, transportasi, dan layanan wisata, tetapi berperan juga sebagai sarana untuk mempromosikan kekayaan budaya lokal, melestarikan tradisi, dan memperkuat identitas daerah (Zulaihah et al., 2024)

Penerapan strategi ini diharapkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung, tetapi juga menciptakan efek ganda terhadap sektor-sektor lain. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa kegiatan pariwisata ditujukan untuk menaikkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan dalam usaha dan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan wilayah (A. R. Chamid Sutikno, 2025)

Revitalisasi adalah strategi pembangunan yang bertujuan memperbaiki berbagai aspek wilayah tidak layak guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan fisik dan partisipasi masyarakat. Revitalisasi wisata adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan destinasi wisata agar lebih menarik bagi wisatawan serta mendukung perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya daerah. Revitalisasi diperlukan karena beberapa masalah seperti menurunnya jumlah pengunjung akibat perawatan yang buruk, kurangnya evaluasi, pengelolaan yang tidak efektif, kerusakan infrastruktur, harga tiket yang tidak sebanding dengan kualitas, serta ketidakmampuan bersaing dengan destinasi lain (I. M. A. Chamid Sutikno, 2022)

Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Daerah merupakan bagian dari skema investasi pemerintah dalam upaya PEN. Pengaturan Pinjaman PEN untuk Daerah tertuang dalam PMK No. 105 tahun 2020 PMK No. 179 tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah. Pendanaan Pinjaman PEN untuk Daerah bersumber dari APBN dan PT SMI. Di tahun 2020, pemerintah daerah yang memperoleh pinjaman PEN dari sumber APBN mendapatkan tingkat suku bunga sebesar 0%, dengan masa tenor maksimal 8 (delapan) tahun. Untuk skema ini, biaya pinjaman yang ditanggung pemerintah daerah berupa provisi sebesar 1%, dan biaya pengelolaan sebesar 0,185%. Sementara itu, jika pemerintah daerah menggunakan sumber dana PT SMI maka pemerintah pusat memberikan subsidi bunga sebesar 3,05%. Jumlah daerah yang mendapatkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Indonesia sebanyak 101 daerah, data dibawah ini adalah pariwisata prioritas yang mendapatkan dukungan dana dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (Saragih, n.d.)

Tabel 1. Sumber Data Pendanaan Pinjaman PEN Untuk Daerah

Objek Wisata	Lokasi	Jumlah
Danau Toba	Sumatera Utara	129,5 Milyar

Borobudur	Jawa Tengah	43,35 Milyar
Mandalika	Lombok, NTB	641,96 Milyar
Labuan Bajo	NTT	172,8 Milyar
Taman Apung Maskemambang, Taman Botani, Menara Teratai	Banyumas	187 Milyar
Pantai Paal	Sulawesi Utara	88,2 Milyar

Sumber : (Saragih, n.d.)

Ada beberapa obyek wisata di Banyumas yang didanai oleh Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu Taman Botani Baturraden, Menara Teratai, dan Taman Apung Maskemambang. Objek wisata Taman Apung Maskemambang ini melakukan pengembangan dikarenakan terjadi degradasi kawasan yang merupakan suatu proses penurunan kualitas dan kuantitas tanah, hutan atau lingkungan secara keseluruhan. Degradasi kawasan dapat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya aktivitas manusia, pertumbuhan penduduk dan perubahan politik. Pengembangan pariwisata dilakukan untuk mengembangkan suatu daerah dengan tujuan menambah nilai dari daerah tersebut. Prasarana dan fasilitas yang tersedia di lokasi pariwisata sangat penting untuk menarik pengunjung, selain keindahan alam dan buatan yang ditampilkan. Dengan sarana dan prasarana yang semakin lengkap pengunjung akan lebih mudah menikmati wisata (Safitri, 2023)

Wilayah Purwokerto dan Banyumas memiliki potensi besar sebagai kawasan wisata terintegrasi dengan berbagai objek wisata alam, baik alami maupun buatan. Salah satu destinasi unggulan adalah Taman Apung Maskemambang, sebelumnya dikenal sebagai Balai Kemambang, yang direvitalisasi melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat degradasi kawasan. Revitalisasi ini bertujuan meningkatkan nilai kawasan dan memperluas area taman dari 1 hektar menjadi sekitar 4 hektar. Setelah resmi dibuka kembali pada 4 Mei 2022, taman ini mencatat lonjakan pengunjung hingga 3.000 orang per hari. Meskipun tarif awal sebesar Rp15.000 dianggap sepadan dengan fasilitas yang disediakan, kebijakan baru menurunkan tarif menjadi Rp2.000 guna meningkatkan keterjangkauan. Namun, pengelola menilai tarif tersebut tidak mencukupi untuk biaya operasional dan berpotensi menurunkan kualitas layanan serta pendapatan daerah, meskipun jumlah pengunjung meningkat secara signifikan.

Tabel 2. Alokasi APBN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

	Realisasi Sementara 2020	Alokasi 2021 (per 22 Feb 2021)	Growth (%)
Belanja APBN	Rp 2.589,9 T	Rp 2.750,0 T	6.2
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	Rp 579,8 T	Rp 699,43 T	20.6
Kesehatan	Rp 63,5 T	Rp 176,3 T	177.6
Perlindungan Sosial	Rp 220,4 T	Rp 157,4 T	-28.6
Dukung UMKM & Pembiayaan Korporasi	Rp 173,2 T	Rp 186,8 T	7.9

Efektivitas Revitalisasi Wisata Taman Apung Maskemambang Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyumas

Insentif Usaha & Pajak	Rp 56,1 T	Rp 53,9 T	-3.9
Program Prioritas	Rp 66,6 T	Rp 125,1 T	87.8
Defisit (%PDB)	6,09%	5,70%	

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>

Alokasi APBN untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi sementara tahun 2020. Pada tahun 2020, realisasi anggaran PEN mencapai Rp 579,8 triliun, sementara alokasi tahun 2021 naik menjadi Rp 699,43 triliun, atau tumbuh sebesar 20,6%. Kenaikan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, dengan fokus pada penguatan sektor kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, serta program prioritas lainnya. Peningkatan alokasi ini juga diiringi dengan upaya menurunkan defisit APBN dari 6,09% PDB pada 2020 menjadi 5,70% PDB pada 2021, menandakan pengelolaan fiskal yang lebih hati-hati di tengah tantangan pemulihan ekonomi.

Tabel 3. Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017-2020 (Sebelum Revitalisasi)

Tabel 3: Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 - 2020 (Secara Realisasi)				
Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten Banyumas			
Tahun	2020	2019	2018	2017
Pendapatan Asli Daerah	729.892.819	636.507.460	3.265.926.652	619.701.628

Sumber : <https://banyumaskab.bps.go.id>

Tabel 4. Data Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022-2024 (Setelah Revitalisasi)

Tahun	2022	2023	2024	2025
Pendapatan Asli Daerah	3.245.866.000	2.076.390.000	1.103.794.000	859.410.000

Sumber : <https://radarbanyumas.disway.id>

Pengelola Objek Wisata Taman Apung Maskemambang, Zahra Fithri Widianingrum Rustawa menyatakan adanya peningkatan pengunjung. Peningkatan pengunjung tersebut dikarena oleh 2 faktor diantaranya pandemi dan baru dibuka pada bulan Mei 2022 kemarin. Berikut adalah data pengunjung Taman Apung Masemambang.

Tabel 5. Jumlah Pengunjung Sebelum Dan Sesudah Revitalisasi

Keterangan	Tahun	Bulan Dengan Kunjungan Terbanyak	Jumlah Pengunjung	Jumlah Pendapatan
	2017	Oktober	59.516	619.701.628
	2018	Juni	37.626	3.265.926.652
Sebelum revitalisasi				
	2019	Juni	47.323	636.507.460
	2020	Januari	23.908	729.892.819
	2021	Mei	14.088	617.324.000
	2022	Mei	89.687	3.245.866.000

	2023	Oktober	104.775	2.076.390.000
Sesudah revitalisasi				
	2024	Mei	64.407	1.103.794.000
	2025	April	54.618	859.410.000

Sumber: Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Keberhasilan pemerintah dalam merevitalisasi Taman Apung Maskemambang memberikan nuansa baru untuk wilayah purwokerto dan banyumas. Revitalisasi juga dilakukan sebagai strategi untuk lebih memperkenalkan obyek wisata kepada wisatawan dari dalam kota maupun luar kota. Karena melihat keberhasilan dari pihak pemerintah dalam mengembangkan objek wisata menjadi lebih maju dan diminati masyarakat membuat ketertarikan peneliti untuk meneliti revitalisasi Taman Apung Maskemambang. Berdasarkan hasil observasi, penulis tertarik meneliti “Efektivitas Revitalisasi Wisata Taman Apung Maskemambang dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyumas”. Meskipun jumlah pengunjung meningkat setelah revitalisasi, pendapatan daerah justru menurun akibat penyesuaian tarif masuk yang lebih murah dari objek wisata pada umumnya. Penelitian ini penting untuk menelaah dampak kebijakan tarif terhadap PAD serta upaya menjaga keseimbangan antara peningkatan kunjungan dan kontribusi pendapatan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan penulis terapkan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimana pendekatannya melalui metode penelitian lapangan dengan jenis metode deskriptif, dengan alasan: Pertama, masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu tentang bagaimana pengembangan atraksi wisata dalam menciptakan minat wisata masyarakat. Kedua, keingintahuan penulis mengenai seberapa besar pengaruh revitalisasi terhadap minat pengunjung dibandingkan dengan sebelum dilakukan revitalisasi atau dengan kata lain, seberapa efektifkah program atau kebijakan revitalisasi tersebut. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang metode sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada kondisi yang alamiah tanpa adanya manipulasi di dalamnya. tanpa adanya manipulasi di dalamnya dan tanpa adanya penggunaan hipotesis, dengan metode alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukan merupakan generalisasi berdasarkan ukuran kuantitas, dengan metode alamiah bila hasil penelitian yang diharapkan bukan generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, melainkan makna (aspek kualitas) dari fenomena yang diamati, (aspek kualitas) dari fenomena yang diamati (Safitri, 2023).

Studi ini dilakukan di Taman Apung Mas Kemambang dan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Banyumas serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Banyumas. Studi ini dilakukan dari Oktober 2024 hingga Februari 2025. Sasaran penelitian adalah orang-orang yang memahami dan terlibat secara langsung dalam proses revitalisasi Taman Apung Mas Kemambang. Pihak-pihak ini termasuk BLUD Kabupaten Banyumas, pengelola wisata Taman Apung Mas Kemambang, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam proses tersebut. Untuk memilih informan untuk penelitian ini, metode kombinasi purposive sampling dan random sampling digunakan. Purposive sampling digunakan untuk memilih informan berdasarkan tujuan penelitian, terutama untuk pihak yang memiliki pemahaman mendalam tentang proses dan hasil revitalisasi. Selain itu, metode random sampling

Efektivitas Revitalisasi Wisata Taman Apung Maskemambang Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyumas

memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai informan. Akibatnya, data yang dikumpulkan lebih representative dan tidak bias. Untuk mengetahui seberapa efektif revitalisasi Taman Apung Mas Kemambang dalam meningkatkan PAD Kabupaten Banyumas, penelitian ini membutuhkan subjek dan populasi. Oleh karena itu, informan yang dipilih adalah mereka yang memiliki informasi dan keterlibatan langsung dalam bidang pengelolaan, keuangan, dan bagaimana revitalisasi Taman Apung Mas Kemambang berdampak pada ekonomi lokal dan meningkatkan PAD Kabupaten Banyumas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Taman Apung Maskemambang merupakan salah satu objek wisata unggulan yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas, tepatnya di kawasan Purwokerto. Objek wisata ini sebelumnya dikenal dengan nama Balai Kemambang, yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau sekaligus sarana rekreasi masyarakat. seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan akan pengembangan sektor pariwisata daerah, kawasan ini kemudian mengalami revitalisasi dan resmi berganti nama menjadi Taman Apung Maskemambang. Taman Apung Maskemambang memiliki konsep wisata rekreasi keluarga yang mengedepankan keindahan taman, elemen perairan, serta fasilitas buatan yang ramah bagi berbagai kalangan usia. Kawasan ini dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 4 hektar dibandingkan kondisi sebelum adanya revitalisasi yang memiliki luas 1 hektar, Perluasan kawasan tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya tampung pengunjung serta menambah variasi fasilitas pendukung wisata.



Gambar 1. Denah Taman Apung Maskemambang

Revitalisasi Taman Apung Maskemambang dilaksanakan melalui dukungan pendanaan dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Program revitalisasi ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam memulihkan sektor pariwisata pasca pandemi Covid-19 sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah dilakukan revitalisasi, Taman Apung Maskemambang mengalami perubahan signifikan baik dari sisi fisik maupun pengelolaan. Berbagai fasilitas baru ditambahkan, seperti wahana permainan air, taman tematik, area kuliner, spot swafoto, sarana edukasi, serta fasilitas penunjang lainnya seperti area parkir, toilet umum, dan ruang terbuka hijau yang tertata. Pembenahan infrastruktur ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan memperkuat daya tarik wisata.

Pengelolaan Taman Apung Maskemambang berada di bawah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kabupaten Banyumas, dengan melibatkan tenaga kerja yang

sebagian besar berasal dari masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan pengembangan pariwisata daerah. Sejak dibuka kembali secara resmi pada 4 Mei 2022, Taman Apung Maskemambang menunjukkan peningkatan jumlah kunjungan yang cukup signifikan. Pada periode awal pasca revitalisasi, jumlah pengunjung tercatat mencapai ribuan orang per hari, terutama pada akhir pekan dan hari libur. Kondisi ini menunjukkan bahwa revitalisasi yang dilakukan berhasil meningkatkan minat masyarakat terhadap objek wisata tersebut.

Efektivitas Revitalisasi Taman Apung Maskemambang terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Revitalisasi Taman Apung Maskemambang merupakan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengoptimalkan sektor pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pascapandemi Covid-19. Sebelum direvitalisasi, kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai Balai Kemambang mengalami penurunan fungsi dan daya tarik akibat keterbatasan fasilitas serta pengelolaan yang belum optimal, sehingga kontribusinya terhadap PAD relatif rendah. Melalui pemanfaatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah daerah melakukan pengembangan kawasan secara menyeluruh, meliputi perluasan area, penambahan fasilitas pendukung, serta pembaruan sistem pengelolaan. Perubahan ini terbukti meningkatkan daya tarik wisata, yang tercermin dari lonjakan jumlah kunjungan setelah kawasan dibuka kembali pada tahun 2022, sekaligus memperkuat peran Taman Apung Maskemambang sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Banyumas.

Efektivitas revitalisasi tersebut juga terlihat dari meningkatnya kontribusi kawasan terhadap PAD melalui optimalisasi berbagai sumber penerimaan, seperti retribusi tiket masuk, penyewaan fasilitas, serta kerja sama dengan pihak ketiga. Kebijakan penyesuaian tarif tiket masuk yang lebih terjangkau mampu mendorong peningkatan jumlah pengunjung secara signifikan, sehingga meskipun nilai tiket lebih rendah, pendapatan yang diperoleh menjadi lebih stabil dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan sistem pengelolaan berbasis BLUD dan digitalisasi melalui *e-ticketing* meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pendapatan. Revitalisasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan PAD, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pemberdayaan UMKM dan penyerapan tenaga kerja lokal, sehingga pengembangan Taman Apung Maskemambang dapat dinilai efektif dan berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Konsep efektivitas revitalisasi menurut William N Dunn memiliki aspek penting dalam mengukur keberhasilan suatu efektivitas yang dapat dilihat dari aspek :

Efisiensi

Efisiensi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan publik menurut William N. Dunn. Efisiensi berkaitan dengan sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal (Anwaruddin & Ed, 1927) Dalam konteks revitalisasi Taman Apung Maskemambang, efisiensi dapat dianalisis melalui penggunaan sumber daya yang optimal dan produktivitas sumber daya yang dihasilkan setelah program revitalisasi dilaksanakan. Penggunaan sumber daya yang optimal mengacu pada kemampuan pengelola dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik sumber daya keuangan, sumber daya manusia, maupun sumber daya fisik secara tepat sasaran untuk mencapai tujuan revitalisasi. Sumber daya keuangan dalam revitalisasi Wisata Taman Apung Maskemambang melibatkan Pemerintah Kabupaten

Efektivitas Revitalisasi Wisata Taman Apung Maskemambang Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyumas

Banyumas, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta dana dari program Pemulihan Dana Nasional (PEN).

Sumber daya manusia yang terlibat dalam revitalisasi Taman Apung Maskemambang meliputi pengelola wisata, pegawai BLUD Kabupaten Banyumas, tenaga operasional, petugas ticketing, petugas kebersihan, petugas keamanan, serta masyarakat sekitar yang dilibatkan dalam pengelolaan kawasan wisata. Selain itu, pelaku UMKM lokal juga menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi di kawasan wisata setelah revitalisasi dilakukan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata menunjukkan adanya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan sektor pariwisata daerah. Wisata Taman Apung Mas Kemambang menerima dukungan pendanaan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan nilai sebesar Rp27.958.700.0000 yang dialokasikan untuk kegiatan konstruksi sebagai bagian dari upaya revitalisasi kawasan wisata.

Tabel 6. Laporan Pelaksanaan Pinjaman PEN Thn. 2021

No	Nama Bangunan	Jumlah	Luas Total
1	Pekerjaan Persiapan	Rp 365.952.036.32	21.700 m2
2	Gerbang	Rp 332.490.318.68	
3	Pos Ticketing	Rp 89.213.294.20	12 m2
4	Pagar Depan	Rp 390.594.460.56	159,325 m
5	Tembok Keliling Selatan	Rp 87.244.539.00	91 m
6	Talud Sungai dan Pagar Special Mesh	Rp 1.608.095.394.41	
	Jalan Akses Masuk,	Rp 2.591.867.781.44	5.979,84 m
7	Trotoar dan Zona Parkir Outdoor		
8	Trotoar	Rp 60.918.690.00	153.3 m2
9	Jembatan BC	Rp 294.067.106.10	32 m2
10	Jembatan BC	Rp 143.299.713.93	15 m2
11	Gedung Parkir	Rp 3.738.549.337.28	495 m2
12	Jaringan Sumber Air dan SIPAS	Rp 484.850.409.88	
	Kolam	Rp 2.556.310.857.91	3.869,49 m2
13	Jalan pedestrian		1.082,42 m2
14	Saluran	Rp 744.448.246.55	
	Hardscape Taman	Rp 786.690.367.97	42 m2
15	Bermain, zona sawah, dan Gazebo		
16	Softscape Taman	Rp 1.124.752.884.94	10.192 m2
17	Toilet Umum	Rp 327.193.414.05	53,24 m2
18	Jaringan Sanitasi	Rp 258.512.729.70	
19	Jaringan Listrik Kawasan	Rp 663.236.068.00	

20	Street Furnitur	Rp 501.487.357.37	
21	Rumah Adat Bali	Rp 276.641.254.61	75,3 m2
22	Rumah Jawa	Rp 1.808.066.330.77	177,8 m2
23	Pendopo	Rp 1.479.787.167.08	132 m2
24	Windmill	Rp 133.159.456.40	46,48 m2
25	Rumah Lumbung (6)	Rp 1.535.668.290.80	144 m2
26	Gazebo (35) dan Kapal (20)	Rp 2.078.764.365.35	260 m2
27	UMKM (40)	Rp 926.000.626.70	300 m2
28	Pekerjaan Lain-lain (Penangkal Petir)	Rp 29.137.500.00	

Sumber. Hasil Wawancara dengan BLUD Kab. Banyumas

Berdasarkan hasil penelitian, dana PEN yang dialokasikan untuk revitalisasi Taman Apung Maskemambang dimanfaatkan untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur, seperti perluasan kawasan taman, penambahan fasilitas umum, penataan ruang terbuka hijau, serta peningkatan sarana pendukung wisata seperti, area sepeda air yang melibatkan pihak ketiga, adanya festival yang diadakan tiap tahunnya seperti pameran lampu dengan animasi 3D yang mampu membantu Pendapatan Asli Daerah dengan pembagian hasil. Pemanfaatan dana tersebut menunjukkan adanya upaya optimalisasi sumber daya keuangan, karena dana tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan daya tarik wisata secara menyeluruh. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa sumber daya yang telah diinvestasikan melalui program PEN mampu menghasilkan output berupa peningkatan minat wisatawan dan intensitas kunjungan. Dari sisi produktivitas, kondisi ini menunjukkan bahwa revitalisasi berhasil meningkatkan kinerja objek wisata dengan memanfaatkan sumber daya yang telah dialokasikan.

Berdasarkan hasil analisis pada aspek efisiensi, dapat disimpulkan bahwa landasan teori efektivitas kebijakan publik menurut William N. Dunn yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai dengan objek dan fokus kajian. Konsep efisiensi yang menekankan pada pemanfaatan sumber daya secara optimal dan pencapaian hasil yang maksimal dengan biaya yang tersedia mampu menjelaskan secara sistematis pelaksanaan revitalisasi Wisata Taman Apung Maskemambang. Pemanfaatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dalam program revitalisasi dapat dianalisis secara jelas. Melalui kerangka teori tersebut, sehingga menunjukkan keterkaitan yang kuat antara teori dan temuan lapangan. Dengan demikian, penggunaan landasan teori William N. Dunn pada aspek efisiensi dinilai relevan dan tepat dalam mengkaji efektivitas revitalisasi wisata dalam konteks peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safitri (2023) menjelaskan bahwa revitalisasi Taman Apung Maskemambang mampu meningkatkan minat wisata masyarakat melalui pengembangan fasilitas dan penataan kawasan wisata. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa revitalisasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah pengunjung setelah dilakukan pembaruan fasilitas wisata. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai keberhasilan revitalisasi dalam meningkatkan daya tarik wisata dan jumlah kunjungan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian Safitri

Efektivitas Revitalisasi Wisata Taman Apung Maskemambang Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyumas

(2023) lebih menitikberatkan pada peningkatan minat wisata masyarakat terhadap objek wisata setelah revitalisasi dilakukan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada aspek efisiensi revitalisasi berdasarkan teori William N. Dunn, khususnya mengenai optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta produktivitas sumber daya dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas.

Kecukupan

Menurut William N. Dunn, kecukupan (*adequacy*) merupakan salah satu kriteria penting dalam menilai efektivitas kebijakan publik. Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana tingkat efektivitas suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang melatarbelakangi munculnya suatu permasalahan. Dengan kata lain, kecukupan tidak hanya menilai apakah tujuan kebijakan tercapai, tetapi juga apakah pencapaian tersebut sudah cukup untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Purnawati, 2026). aspek kecukupan revitalisasi Taman Apung Maskemambang dianalisis melalui dua sub aspek, yaitu cakupan program/kebijakan dan kesediaan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan revitalisasi.

Cakupan program atau kebijakan merujuk pada sejauh mana revitalisasi Taman Apung Maskemambang mampu menjangkau seluruh permasalahan utama yang ada sebelum revitalisasi dilaksanakan. Sebelum dilakukan revitalisasi, kawasan Taman Apung Maskemambang mengalami berbagai permasalahan, seperti penurunan jumlah pengunjung, degradasi kawasan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta menurunnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas.

Program revitalisasi yang dilaksanakan melalui pendanaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencakup berbagai aspek penting, mulai dari perbaikan infrastruktur fisik, perluasan kawasan taman, penataan ruang terbuka hijau, hingga penambahan fasilitas pendukung wisata seperti pembangunan cottage atau penginapan, penyediaan perahu apung yang terintegrasi dengan area kuliner, serta pembangunan rumah joglo dan pendopo terbuka. Dari wawancara yang telah dilakukan, penambahan fasilitas pendukung wisata tersebut memiliki tarif biaya masuk seperti berikut :

Tabel 7. Data Penambahan Fasilitas Pendukung Wisata

No	Nama Fasilitas	Tarif Biaya Masuk/Sewa
1.	Cottage	Rp. 400.000/hari
2.	Sepeda Air	Rp. 20.000
3.	Rumah Joglo	Rp.750.000/hari
4.	Pendopo Terbuka	Rp.500.000/hari

Sumber: Hasil Wawancara Penelitian

Cakupan program ini menunjukkan bahwa kebijakan revitalisasi tidak hanya berfokus pada satu aspek tertentu, tetapi dirancang secara komprehensif untuk menghidupkan Kembali fungsi Kawasan wisata sebagai ruang public dan destinasi wisata unggulan Selain itu, kebijakan revitalisasi juga mencakup upaya peningkatan aksesibilitas dan daya tarik wisata dengan menyesuaikan tarif masuk agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan secara signifikan setelah revitalisasi sebagaimana data dibawah ini:

Tabel 8. Data Perbandingan Kunjungan Wisatawan

Keterangan	Tahun	Bulan Dengan Jumlah Kunjungan Terbanyak	Jumlah Kunjungan	Jumlah Pendapatan
Sebelum Revitalisasi	2019	Juni	47.323	636.507.460
Sesudah Revitalisasi	2023	Oktober	104.775	2.076.390.000

Sumber: hasil wawancara penelitian

Dengan demikian, dari sisi cakupan program, revitalisasi Taman Apung Maskemambang dapat dikatakan cukup memadai karena mampu menjawab permasalahan utama yang menjadi latar belakang dilaksanakannya kebijakan tersebut. Ketersediaan sumber daya dalam aspek kecukupan berkaitan dengan ketersediaan dan kesiapan sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan revitalisasi secara berkelanjutan. Sumber daya yang dimaksud meliputi sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung. Sisi sumber daya keuangan, revitalisasi Taman Apung Maskemambang didukung oleh dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang relatif memadai untuk melaksanakan pembangunan fisik dan pengembangan fasilitas wisata dengan alokasi anggaran sebesar 28 M.

Dana tersebut memungkinkan pemerintah daerah untuk merevitalisasi kawasan secara menyeluruh, sehingga kondisi taman menjadi lebih representatif dan menarik bagi wisatawan. Dari sisi sumber daya manusia, ketersediaan tenaga pengelola dan pekerja yang berasal dari masyarakat lokal dinilai cukup mendukung operasional taman wisata. Keterlibatan masyarakat sekitar tidak hanya memperkuat kapasitas pengelolaan, tetapi juga memberikan dampak positif berupa peningkatan kesempatan kerja dan rasa memiliki terhadap keberlangsungan objek wisata. Hal ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia telah mencukupi kebutuhan operasional Taman Apung Maskemambang.

Berdasarkan hasil analisis pada aspek kecukupan, dapat disimpulkan bahwa landasan teori efektivitas kebijakan publik menurut William N. Dunn yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai dengan fokus dan objek kajian. Konsep kecukupan yang menekankan pada sejauh mana suatu kebijakan mampu memenuhi kebutuhan serta menjawab permasalahan yang melatarbelakangi pelaksanaannya terbukti relevan dalam menganalisis revitalisasi Taman Apung Maskemambang.

Penelitian terdahulu oleh (Safitri, 2023) menjelaskan bahwa revitalisasi kawasan wisata mampu memperbaiki kondisi fasilitas dan meningkatkan kenyamanan pengunjung sehingga objek wisata menjadi lebih menarik. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu membahas revitalisasi Taman Apung Maskemambang sebagai upaya pengembangan kawasan wisata agar mampu menarik lebih banyak wisatawan. Perbedaannya terletak pada fokus analisis penelitian. Penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada peningkatan daya tarik wisata dan minat pengunjung, sedangkan penelitian ini menekankan aspek kecukupan menurut William N. Dunn, yaitu sejauh mana program revitalisasi mampu menjawab permasalahan utama sebelum revitalisasi serta didukung oleh ketersediaan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang memadai.

Perataan

Perataan (*equity*) merupakan salah satu kriteria efektivitas kebijakan publik menurut William N. Dunn yang berkaitan dengan keadilan dalam distribusi manfaat dan beban kebijakan kepada seluruh kelompok masyarakat. Kebijakan publik dikatakan adil apabila manfaat dan biaya yang ditimbulkan dapat didistribusikan secara merata dan tidak menimbulkan ketimpangan antar kelompok. Dengan demikian, perataan tidak hanya menilai keberhasilan kebijakan secara teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan sosial. aspek perataan revitalisasi Taman Apung Maskemambang dianalisis melalui dua sub aspek, yaitu kesamaan akses terhadap sumber daya dan kesamaan perlakuan terhadap semua pihak.

Kesamaan akses terhadap sumber daya mengacu pada sejauh mana seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan fasilitas, layanan, dan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan revitalisasi. Revitalisasi Taman Apung Maskemambang dirancang tidak hanya sebagai objek wisata komersial, tetapi juga sebagai ruang publik terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat luas. kebijakan penurunan tarif tiket masuk Taman Apung Maskemambang menjadi relatif murah merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah daerah dalam menciptakan kesamaan akses bagi seluruh masyarakat. Tarif yang terjangkau memungkinkan berbagai kelompok sosial, baik dari kalangan ekonomi menengah ke bawah maupun menengah ke atas, untuk menikmati fasilitas wisata tanpa adanya hambatan biaya yang signifikan. Kebijakan ini mencerminkan prinsip perataan karena membuka peluang yang sama bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang publik dan fasilitas wisata yang telah direvitalisasi.

Keberadaan fasilitas yang bersifat umum seperti taman kota, ruang terbuka hijau, area bermain anak, dan ruang publik multifungsi semakin memperkuat kesamaan akses terhadap sumber daya. Kawasan Taman Apung Maskemambang tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai lokasi kegiatan sosial, pendidikan, keagamaan, dan komunitas. Hal ini menunjukkan bahwa hasil revitalisasi dapat diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Di sisi lain, kesamaan akses juga terlihat dari keterlibatan masyarakat sekitar dalam aktivitas ekonomi di kawasan wisata. Pemerintah daerah dan pengelola memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk beroperasi di dalam kawasan wisata. Kebijakan ini memungkinkan masyarakat sekitar memperoleh akses langsung terhadap sumber daya ekonomi yang muncul akibat revitalisasi, sehingga manfaat kebijakan tidak hanya dinikmati oleh pemerintah daerah, tetapi juga oleh masyarakat lokal.

Kesamaan perlakuan terhadap semua pihak berkaitan dengan penerapan kebijakan dan aturan yang berlaku secara adil dan tidak diskriminatif terhadap seluruh pemangku kepentingan, baik pengunjung, pelaku usaha, maupun masyarakat sekitar. Dalam konteks revitalisasi Taman Apung Maskemambang, kesamaan perlakuan tercermin dari penerapan sistem tarif, aturan penggunaan fasilitas, serta mekanisme pengelolaan kawasan yang berlaku secara umum. penetapan tarif masuk, tarif sewa fasilitas seperti pendopo dan rumah joglo, serta tarif wahana permainan dilakukan secara terbuka dan mengacu pada regulasi resmi yang berlaku. Seluruh pengunjung dikenakan tarif yang sama tanpa adanya perbedaan perlakuan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, maupun asal daerah. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menjamin keadilan dalam pelayanan publik. kesamaan perlakuan juga diterapkan terhadap pelaku UMKM dan mitra usaha yang beroperasi di dalam kawasan wisata. Pengelola menetapkan ketentuan kerja sama dan sewa lahan berdasarkan perjanjian yang jelas dan berlaku bagi seluruh pelaku usaha.

Dalam aspek ketenagakerjaan, pengelola kawasan wisata juga memberikan kesempatan kerja yang relatif merata bagi masyarakat sekitar. Perekrutan tenaga kerja dilakukan dengan memprioritaskan warga lokal tanpa membedakan latar belakang sosial, selama memenuhi kebutuhan operasional. Kebijakan ini mencerminkan kesamaan perlakuan sekaligus memperkuat fungsi sosial revitalisasi sebagai sarana pemerataan manfaat pembangunan. meskipun prinsip perataan telah diterapkan secara cukup baik, masih terdapat potensi ketimpangan dalam distribusi manfaat ekonomi. Tidak seluruh pengunjung atau masyarakat memanfaatkan fasilitas berbayar seperti cottage atau rumah joglo sehingga manfaat ekonomi langsung lebih banyak dirasakan oleh kelompok tertentu

Pada penelitian (Zulaihah et al., 2024) menjelaskan bahwa pengembangan sektor pariwisata dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui keterlibatan masyarakat lokal dalam aktivitas wisata. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada adanya pembahasan mengenai keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM dalam mendukung pengembangan wisata daerah. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada strategi pengembangan desa wisata dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata. Sementara itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek perataan menurut teori William N. Dunn, yaitu kesamaan akses masyarakat terhadap fasilitas wisata, kesamaan perlakuan dalam pelayanan publik, serta pemerataan manfaat ekonomi hasil revitalisasi Taman Apung Maskemambang.

Responsivitas

Responsivitas merupakan salah satu kriteria evaluasi kebijakan publik yang menilai sejauh mana suatu kebijakan atau program mampu menanggapi kebutuhan, tuntutan, serta perubahan yang berkembang di masyarakat. Responsivitas menekankan kesesuaian antara kebijakan yang dilaksanakan dengan aspirasi, permasalahan, dan dinamika yang dihadapi oleh kelompok sasaran. Kebijakan yang responsif tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga adaptif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, maupun lingkungan (Khoiruddin, 2024). Kemampuan merespon perubahan dan kebutuhan masyarakat menjadi indikator utama dalam menilai responsivitas suatu kebijakan atau program. Dalam perspektif Dunn, kebijakan dikatakan responsif apabila mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan situasi serta kebutuhan baru yang muncul selama proses implementasi berlangsung.

Perubahan tersebut dapat berupa perubahan kondisi lapangan, peningkatan jumlah atau karakteristik pengguna layanan, maupun perubahan preferensi dan harapan masyarakat. Kemampuan merespon perubahan tercermin dari fleksibilitas pengelola atau pelaksana kebijakan dalam melakukan penyesuaian terhadap mekanisme kerja, pelayanan, maupun strategi pelaksanaan program. Ketika kebijakan menghadapi tantangan baru, seperti meningkatnya tuntutan masyarakat atau munculnya permasalahan yang sebelumnya tidak diprediksi, responsivitas ditunjukkan melalui tindakan yang tepat untuk mengatasi kondisi tersebut tanpa mengabaikan tujuan kebijakan. Kemampuan merespon kebutuhan masyarakat terlihat dari sejauh mana kebijakan memperhatikan aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh kelompok sasaran. Kebijakan yang responsif menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan serta memastikan bahwa masukan tersebut ditindaklanjuti secara nyata. Hal ini menunjukkan adanya orientasi pelayanan publik yang berpusat pada kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata pada kepentingan administratif (Megawati, 2018)

Teori William N. Dunn pada aspek responsivitas dinilai relevan dan tepat digunakan dalam menganalisis efektivitas revitalisasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. dapat disimpulkan bahwa landasan teori

efektivitas kebijakan publik menurut William N. Dunn telah sesuai dengan fokus penelitian. Konsep responsivitas yang menekankan pada kemampuan kebijakan dalam merespon kebutuhan, aspirasi, dan perubahan kondisi masyarakat mampu menjelaskan pelaksanaan revitalisasi Taman Apung Maskemambang, khususnya dalam penyesuaian tarif, peningkatan fasilitas serta pengelolaan yang paling adaptif terhadap dinamika kunjungan wisatawan.

Penelitian Megawati (2018) menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan publik dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pentingnya kemampuan pengelola atau pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian Megawati (2018) lebih berfokus pada efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada responsivitas pengelola wisata dalam merespon perubahan kebutuhan pengunjung, peningkatan fasilitas wisata, penyesuaian tarif masuk, serta pengembangan pelayanan wisata pasca revitalisasi.

Ketepatan

Menurut William N. Dunn, *ketepatan (appropriateness)* merupakan salah satu kriteria penting dalam evaluasi kebijakan publik yang berkaitan dengan sejauh mana tujuan, sasaran, dan asumsi suatu kebijakan benar-benar tepat untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Ketepatan tidak hanya menilai apakah kebijakan berhasil mencapai tujuan, tetapi juga menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan kondisi, nilai, serta konteks sosial dan lingkungan tempat kebijakan diterapkan. Dengan demikian, kebijakan yang tepat adalah kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan karakteristik wilayah serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Potensi geografis dalam menilai ketepatan kebijakan merujuk pada kesesuaian kebijakan dengan kondisi fisik, letak strategis, dan karakteristik wilayah. Dalam perspektif Dunn, kebijakan publik dikatakan tepat apabila memanfaatkan keunggulan geografis yang dimiliki suatu daerah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemanfaatan potensi geografis yang optimal menunjukkan bahwa kebijakan disusun berdasarkan realitas objektif wilayah. Ketepatan kebijakan dalam konteks potensi geografis terlihat dari pemilihan lokasi, jenis kegiatan, serta pengembangan fasilitas yang selaras dengan kondisi alam dan lingkungan sekitar. Wilayah yang memiliki letak strategis, aksesibilitas tinggi, serta daya dukung lingkungan yang memadai akan lebih tepat dikembangkan melalui kebijakan yang berorientasi pada pemanfaatan ruang publik atau pengembangan sektor tertentu, seperti pariwisata.

Dengan demikian, kebijakan yang memanfaatkan potensi geografis secara tepat akan lebih berkelanjutan dan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. ketepatan juga tercermin dari kemampuan kebijakan dalam meminimalkan risiko lingkungan dan sosial yang mungkin timbul akibat pemanfaatan ruang. Kebijakan yang tepat tidak hanya mengejar manfaat ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan wilayah dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, potensi geografis menjadi dasar penting dalam menilai apakah suatu kebijakan telah dirancang secara rasional dan kontekstual. Pelestarian budaya lokal menekankan pada kesesuaian kebijakan dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat setempat. Menurut Dunn, kebijakan publik harus selaras dengan nilai dan norma masyarakat agar dapat diterima dan didukung secara luas.

Ketepatan kebijakan tidak hanya diukur dari capaian material, tetapi juga dari kemampuannya menjaga dan menghormati identitas budaya lokal. Kebijakan yang tepat dalam konteks pelestarian budaya lokal adalah kebijakan yang tidak mengabaikan, apalagi menghilangkan, nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas masyarakat setempat. Sebaliknya, kebijakan tersebut justru mendorong integrasi antara pembangunan dan pelestarian budaya. Hal ini penting karena budaya lokal merupakan aset sosial yang memiliki nilai historis, edukatif, dan simbolik bagi masyarakat. Pelestarian budaya lokal juga berperan dalam meningkatkan legitimasi kebijakan di mata masyarakat. Ketika kebijakan mampu mengakomodasi unsur budaya lokal, masyarakat akan merasa memiliki dan terlibat dalam proses pelaksanaan kebijakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan telah disusun secara tepat dengan mempertimbangkan dimensi sosial-budaya, bukan hanya aspek ekonomi atau fisik semata (Anwaruddin & Ed, 1927)

Konsep ketepatan yang menekankan pada kesesuaian kebijakan dengan permasalahan, kondisi wilayah, serta nilai sosial budaya masyarakat mampu menjelaskan bahwa revitalisasi Taman Apung Maskemambang dirancang secara kontekstual dan relevan dengan kebutuhan pengembangan pariwisata daerah. Dengan demikian, penggunaan teori William N. Dunn pada aspek ketepatan dinilai tepat dan mendukung analisis efektivitas revitalisasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian milik Chamid Sutikno (2025) menjelaskan bahwa pengembangan potensi wisata harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan potensi lokal agar mampu berkembang secara optimal dan berkelanjutan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pentingnya pemanfaatan potensi geografis dan karakteristik wilayah dalam pengembangan sektor pariwisata. Perbedaannya, penelitian terdahulu lebih berfokus pada strategi pengembangan potensi wisata desa, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek ketepatan revitalisasi berdasarkan teori William N. Dunn, yaitu kesesuaian kebijakan revitalisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas revitalisasi Wisata Taman Apung Maskemambang dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas, dapat disimpulkan bahwa program revitalisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berjalan efektif dan dapat uraikan sebagai berikut:

1. Kecukupan

Pada aspek kecukupan, program revitalisasi dinilai telah cukup mampu menjawab permasalahan utama yang terjadi sebelum revitalisasi, seperti keterbatasan fasilitas, penurunan daya tarik wisata, dan rendahnya kontribusi terhadap PAD. Revitalisasi dilakukan secara menyeluruh melalui penambahan fasilitas pendukung seperti adanya sepeda air yang bekerja sama dengan pihak ketiga, penataan kawasan, serta pengembangan sarana wisata yang lebih representatif. Ketersediaan Sumber daya keuangan dan sumber daya manusia juga dinilai memadai untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan kawasan wisata.

2. Efisiensi

Pada aspek efisiensi, revitalisasi Taman Apung Maskemambang dinilai telah berjalan secara efisien karena pemanfaatan sumber daya keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dilakukan secara optimal. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas wisata yang mampu meningkatkan daya tarik kawasan. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata turut mendukung

Efektivitas Revitalisasi Wisata Taman Apung Maskemambang Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Banyumas

efisiensi operasional sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

3. Perataan

Pada aspek perataan, pengelola Taman Apung Maskemambang menerapkan tarif masuk dan fasilitas yang terjangkau agar seluruh masyarakat dapat menikmati kawasan wisata tanpa hambatan biaya. Kebijakan tarif murah tersebut menjadi bentuk subsidi tidak langsung dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk mempertahankan operasional wisata, pengelola memanfaatkan sumber pendapatan lain seperti penyewaan pendopo, rumah joglo, wahana permainan, serta kerja sama dengan UMKM dan pihak ketiga.

4. Responsivitas

Pada aspek responsivitas, pengelola Taman Apung Maskemambang dinilai mampu merespon kebutuhan pengunjung dengan cukup baik melalui penyediaan fasilitas dan pelayanan yang mendukung kenyamanan serta keamanan wisatawan. Hal ini terlihat dari tersedianya perlengkapan P3K sebagai penanganan awal apabila terjadi keadaan darurat atau kecelakaan ringan di area wisata. Selain itu, pengelola juga menyediakan sarana saran dan kritik bagi pengunjung sebagai bentuk keterbukaan terhadap masukan masyarakat guna meningkatkan kualitas pelayanan wisata. Responsivitas pengelola juga terlihat dalam penanganan barang pengunjung yang tertinggal. Dengan demikian, pengelola tidak hanya memperhatikan fasilitas wisata, tetapi juga keamanan dan kepuasan pengunjung secara menyeluruh.

5. Ketepatan

Pada aspek ketepatan, revitalisasi Taman Apung Maskemambang dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan karena kondisi kawasan wisata sebelum revitalisasi mengalami penurunan kualitas, baik dari segi fasilitas, daya tarik wisata, maupun pengelolaan kawasan. Dengan adanya revitalisasi dilakukan ini menjadi langkah yang sesuai untuk menghidupkan kembali fungsi kawasan wisata agar lebih menarik, nyaman, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah daerah. Tujuan revitalisasi Taman Apung Maskemambang adalah untuk meningkatkan kualitas kawasan wisata, memperbaiki sarana dan prasarana, serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah Anggriani. (2016). *Perkembangan Paradigma Administrasi Publik*. *Perkembangan Paradigma Administrasi Publik*, 04(2), 1–28.
- Anwaruddin, D. A., & Ed, M. (1927). *Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan*. 1–16.
- Chamid Sutikno, A. R. (2025). *Strategi Pengembangan Potensi Wisata Svarga Minapadi di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*. 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6701>
- Chamid Sutikno, I. M. A. (2022). *Strategi Revitalisasi Bumdes Di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga*. 19(April), 1–5.
- Indriyani, N., Nisa, C., Atika, Z. R., Sutikno, C., & Permana, I. A. (2024). *No Title*. 8(2), 50–63.
- Khoiruddin. (2024). *Evaluasi Kebijakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah di*

Siti Sundari, Indah Ayu Permana Pribadi, Zaula Rizqi Atika, Chamid Sutikno, Ariesta Amanda

- Kabupaten Parigi Moutong Megawati A . Mandarlangi , Intam Kurnia M . Nur Alamsyah Universitas Tadulako , Indonesia. 5(3).
- krisdayanti. (2022). Efektivitas Krisdayanti 2022. Efektivitas Pembelajaran, Krisdayanti, 1–1.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>
- Mebri, F. H., Suradinata, E., & Kusworo, K. (2022). Internal Tourism Development Strategy Increasing Regional Original Income (Pad) in Jayapura City Papua Province. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 102–114. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v12i1.2537>
- Megawati. (2018). Efektivitas Kebijakan Pahlawan Ekonomi Guna Menurunkan Tingkat Kemiskinan Di Kota Surabaya Aditya Wanda Rahmansyah S1 Ilmu Administrasi Negara , Jurusan Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya Galih Wahyu Pradana.
- Purnawati, L. (2026). Efektivitas Peran Satpol PP Dalam Penanganan Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kabupaten Tulungagung.
- Safitri, E. N. (2023). Efektivitas Revitalisasi Taman Apung Maskemambang Dalam Menciptakan Minat Wisata Masyarakat Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Saragih, M. G. (n.d.). Laporan Kajian Kebijakan Pinjaman PEN untuk Pemerintah Daerah.
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Zahratuddini, A., Zainuddin, Z., & Rizkiya, P. (2022). Pengaruh Revitalisasi Kawasan Krueng Daroy Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Pengembangan Kota*, 10(2), 160–166. <https://doi.org/10.14710/jpk.10.2.160-166>
- Zulaihah, S., Sutikno, C., Ayu, I., Pribadi, P., Amanda, A., & Izza, C. (2024). Strategi Pengembangan Desa Wisata Wahana Wanarata Di Desa Karangmangu Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap. 5(1), 1968–1986.
- Kemenkeu. 2023. Retrieved from kemenkeu.go.id. Di akses pada tanggal 27 November 2024
- 10.33. Tersedia : <https://www.kemenkeu.go.id/informasi/publik/publikasi/berita/utama/Wamenkeu-Uraikan-Jalan-Cerita-Anggaran-PEN>
- Pemerintah Kabupaten Banyumas. 2024. Retrieved from banyumaskab.go.id. Di akses pada tanggal 13 november 2024 21.22. Tersedia : <http://banyumaskab.bps.go.id/id>
- Peraturanbpbk. 2021. Retrieved from [Peraturan.bpk.go.id](https://peraturan.bpk.go.id) Di akses pada tanggal 8 maret 2025
- 21.00. Tersedia : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/276648/%20perbup-kab-banyumas-no-79-tahun-2021>
- Kominfo. 2021. Retrieved from [Kominfo.co.id](https://kominfo.co.id). Di akses pada tanggal 13 maret 2025 18.10. Tersedia : www.kominfo.co.id
- Kemenkeu. 2021. Retrieved from kemenkeu.go.id. Di akses pada tanggal 15 juni 2025 20.04.
- Tersedia : <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuklinggau/id/data/publikasi/berita/terbaru/3313-pemulihan-sektor-pariwisata.html>